

KETERGANTUNGAN LAOS PADA TIONGKOK DALAM EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGHAMBAT TERLAKSANANYA PROGRAM REDUCE INEQUALITY

Yeni Herliana Yoshida

Program Magister Konsentrasi Hubungan Internasional
Universitas Padjadjaran, Indonesia
yeni20005@mail.unpad.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

24 December 2021

Revised

7 February 2022

Accepted

10 February 2022

Keywords:

belt road initiative; China, interdependence; Laos; reduce inequality.

Kata Kunci:

belt road initiative; Tiongkok; ketergantungan; Laos; reduce inequality

Abstract

This paper aims to analysis the dependence of Laos on China in the economy and development which is an obstacle to the implementation of reduce inequality as one of the Sustainable Development Goals (SDGs) programs implemented in Laos. The research method used is a qualitative method and uses a dependency theory as an analytical tool. The results showed that Laos' dependence on China causes Laos' foreign debt to continue to increase, but the problem of the gap in Laos is still quite high. The Belt Road Initiative (BRI) project is very beneficial for Laos because it can help Laos in addressing the problem of geography. However, the longer Laos dependent on China, especially in development and the economy the more difficult it will be for Laos to be able to contribute and realize sustainable programs, such as the program to reduce inequality within Laos.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan Laos pada Tiongkok dalam ekonomi dan pembangunan yang menjadi hambatan bagi terlaksananya *reduce inequality* sebagai salah satu program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diimplementasikan di Laos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, serta menggunakan teori ketergantungan sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan Laos terhadap Tiongkok menyebabkan utang luar negeri Laos terus meningkat, tetapi masalah kesenjangan di Laos masih cukup tinggi. Proyek *Belt Road Initiative* (BRI) sangat menguntungkan bagi Laos, karena bisa membantu Laos dalam mengatasi masalah geografisnya. Namun semakin lama Laos bergantung kepada Tiongkok terutama dalam pembangunan dan ekonomi, maka semakin sulit pula bagi Laos untuk bisa berkontribusi dan mewujudkan program berkelanjutan, seperti program *reduce inequality* di dalam negeri Laos.

PENDAHULUAN

Ketergantungan di antara negara-negara sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum bisa teratasi dengan baik. Ketergantungan negara-negara berkembang atau negara-negara pinggiran terhadap negara-negara maju, tentu saja dapat menghambat pembangunan internasional yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara berkembang yang bergantung kepada negara maju menjadikan negara tersebut semakin meningkat jumlah utang luar negerinya. Ketergantungan yang paling banyak terjadi yaitu ketergantungan dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Negara-negara dengan hasil pertanian, adalah negara yang paling banyak memiliki ketergantungan kepada negara-negara maju. Salah satu contohnya adalah Laos yang merupakan negara dengan hasil pertanian dan masih memiliki ketergantungan kepada banyak negara.

Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah perairan seperti laut, sehingga mendapat julukan *landlocked country*. *Landlocked country* rata-rata adalah negara berkembang dengan keadaan

ekonomi yang sulit. Hal ini pula yang terjadi pada Laos karena memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada negara-negara di sekitarnya, seperti ketergantungan kepada Vietnam, Thailand, Indonesia, dan khususnya kepada Tiongkok (Putri, 2021). Ketergantungan Laos kepada negara-negara maju, tentu saja dapat menghambat program pembangunan internasional PBB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 17 tujuan salah satunya adalah mengenai *reduce inequality* atau mengurangi ketimpangan yang terjadi di antara negara-negara di dunia. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan pembangunan, di antara negara-negara maju dan negara-negara pinggiran.

Bagian yang paling berkesinambungan dengan studi kasus Laos, yaitu pada tujuan ke-10b SDGs mengenai *Encourage Development Assistance and Investment in Least Developed Countries* atau mendorong bantuan pembangunan dan investasi di negara-negara terkecil. Bagian tersebut bertujuan untuk mendorong bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan, termasuk investasi asing

langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, khususnya negara-negara kurang berkembang. Negara-negara berkembang, kepulauan kecil dan negara-negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka (UN Departement of Economic and Social Affairs, 2021).

Untuk menanggulangi permasalahan ekonomi serta pembangunan yang masih jadi permasalahan besar di Laos, peran pemerintah adalah yang utama. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan perekonomian Laos. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Laos untuk hal tersebut ialah dengan kebijakan melaksanakan perdagangan ekspor serta impor ke banyak negara. Laos mengekspor hasil pertanian, hasil pertambangan juga tembaga, emas, baju jadi, listrik dan kayu serta produk kayu. Importir utama buat komoditi ekspor Laos merupakan negeri Thailand, Tiongkok dan Vietnam. Laos mengimpor bahan material konstruksi, mesin, Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan makanan, kendaraan serta suku cadangnya, alat-alat produksi, dan

barang konsumsi. Eksportir utama buat komoditi impor Laos merupakan Thailand, Tiongkok, Vietnam dan Jepang (Putri, 2021).

Produk buatan Tiongkok sangat mudah ditemui di Laos, demikian pula para pedagang banyak berasal dari Tiongkok. Beberapa tahun terakhir, kehadiran orang-orang asal Tiongkok di Laos terus bertambah. Informasi statistik mengatakan sekitar 30.000 masyarakat Tiongkok tinggal di daerah Laos, tetapi sebagian pihak menyatakan angka yang sesungguhnya dapat jadi 10 kali lipat lebih besar. Saat ini di ibukota Vientiane, telah didirikan suatu pasar yang spesial menjual produk buatan Tiongkok, mulai dari bunga plastik sampai benda elektronik (BBC, 2010).

Hubungan bilateral Tiongkok dengan Laos baik politik ataupun ekonomi belum lama ini semakin meningkat. Pasca kerjasama dagang dirintis tahun 2000, Tiongkok membuat investasi di banyak bidang antara lain pertambangan, pertanian serta beberapa barang elektronik. Dua tahun kemudian, diperkirakan beberapa barang buatan Tiongkok yang diimpor Laos mencapai nilai US\$ 131 juta. Tidak hanya masalah impor yang

besar, Laos juga mengalami permasalahan keterbatasan SDM. Tahun 2005, riset Bank Dunia melaporkan 37% dari masyarakat Laos yang berpendidikan tinggal di luar negeri (BBC, 2010).

Ketergantungan Laos pada Tiongkok terhadap ekonomi dan pembangunan akan terus berlanjut, kecuali pemerintah Laos diberi alternatif yang lain. Tiongkok kini adalah sumber utama pembiayaan Laos di antara separuh serta 75% dari hutang luar negeri paling besar ke Tiongkok (asean today, 2020). Salah satu sebabnya karena Tiongkok menawarkan pinjaman serta bantuan tanpa ketentuan apapun seputar transparansi ataupun hak asasi manusia. Selaku imbalan atas proteksi politik serta keuangan, Laos sudah sangat kokoh ada di orbit Tiongkok (asean today, 2021).

Kazuhiro (2010) mengemukakan bahwa meningkatnya kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara khususnya di Laos telah menjadi topik dari banyak liputan media dan minat ilmiah selama beberapa tahun terakhir. Tiongkok telah membuat dirinya terasa semakin nyata, misalnya seperti kunjungan

pejabat tertinggi pemerintah pusat antara kedua negara. Selain itu, ada pertukaran bilateral antara masing-masing pihak yang berkuasa dan kekuatan militer. Tetapi kemajuan paling luar biasa Tiongkok ke Laos adalah melalui kehadirannya. Volume perdagangan bilateral meningkat dan Tiongkok menjadi investor nomor satu ke Laos. Hubungan bilateral juga berkembang di berbagai bidang lain, seperti bidang sosial dan bidang akademik juga budaya. Pemerintah Laos secara resmi menyambut baik bantuan dan investasi Tiongkok. Tiongkok telah mengembangkan dan memperkuat ikatan bilateral dengan Laos dan membuat dirinya terasa lebih kuat di tingkat lokal.

Shanghai Institutes for International Studies (2016), terlepas dari pasang surut dalam hubungan bilateral Tiongkok selalu menghargai Laos sebagai negara saudara yang penting. Setelah melalui perjuangannya sendiri, Laos juga semakin mementingkan penguatan kerjasama dengan Tiongkok. Pentingnya Tiongkok dalam pembangunan nasional Laos

dimanifestasikan oleh fakta bahwa Tiongkok bukan hanya pemberi bantuan dan investor terbesarnya, tetapi juga sumber pengalaman pembangunan yang berharga.

Pada pertemuan KTT G20 Hangzhou pada September 2016, pemimpin Laos hadir sebagai kepala negara tamu. Selama pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di Tiongkok, ia menyatakan bahwa kepemimpinan baru partai dan negara Laos akan secara komprehensif mewarisi dan meneruskan persahabatan tradisional mereka dengan Communist Party of Cooperation (CPC), pemerintah dan rakyat Tiongkok, serta sebagai kemitraan kerjasama strategis komprehensif jangka panjang dan stabil. Laos akan melakukan upaya bersama dengan Tiongkok untuk mempromosikan hubungan persahabatan bilateral untuk terus berkembang. Hubungan Tiongkok - Laos saat ini telah menjadi model kerja sama yang setara antara negara-negara besar dan negara-negara kecil (SIIS, 2016).

Bachtiar (2020) mengemukakan bahwa, peningkatan hubungan bilateral yang bersahabat antara Beijing dan

Vientiane dapat diamati dengan bukti Tiongkok sebagai investor asing terbesar di negara itu. Di satu sisi, perjuangan Laos untuk meningkatkan ekonominya, geografinya yang terkurung daratan dan kebutuhan akan bantuan infrastruktur secara alami membuat negara itu lebih condong ke Tiongkok. Di sisi lain, Beijing membutuhkan keunggulan geografis Laos untuk menyelesaikan proyek Belt Road Initiative (BRI). Kedua belah pihak telah mengembangkan hubungan interdependen yang kompleks dengan Tiongkok yang berusaha membangun sistem geo-ekonomi yang solid sambil mencoba menegaskan posisinya dalam sistem kekuatan struktural. Tindakan penegasan tersebut didukung oleh kebijakan luar negeri Tiongkok yang diprediksi akan dimanfaatkan untuk membujuk negara-negara Asia Tenggara menjadi bagian dari komunitas senasib di bawah kepemimpinan Beijing (Bachtiar, 2020).

Dari beberapa penelitian terdahulu, artikel ini juga membahas mengenai kerjasama ekonomi antara Laos dan Tiongkok namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini ketergantungan Laos pada

Tiongkok menimbulkan hambatan bagi terlaksananya program SDGs mengenai *reduce inequality* khususnya dari tahun 2015-2021. Sementara untuk analisisnya dilakukan dengan menggunakan dua konsep tentang ketergantungan seperti yang dikemukakan oleh Theotonino Dos Santos. Oleh karenanya artikel ini dapat memperkaya studi pembangunan ekonomi sebagai contoh antara hubungan negara maju dengan negara pinggiran.

Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Theotonino Dos Santos (1970) memberikan definisi ketergantungan, menurutnya ketergantungan adalah keadaan kehidupan ekonomi suatu negara yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perluasan kehidupan ekonomi negara lain. Sementara beberapa negara hanya bertindak sebagai pihak yang menanggung akibatnya. Hubungan saling tergantung antara dua sistem ekonomi atau lebih, dan hubungan antara sistem-sistem ekonomi ini dengan perdagangan dunia, menjadi

hubungan ketergantungan bila ekonomi beberapa negara (maju dan dominan) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara-negara lainnya (yang tergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif (Santos, 1970, pp. 231–236).

Teori ketergantungan muncul dengan perspektif bahwa tidak ada negara yang otonom di dunia, semua ikut serta dalam ekonomi dunia secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti yang dikemukakan oleh golongan non-marxis atau di dalam sistem kapitalis, yang dikemukakan oleh golongan marxis. Santos beranggapan juga bahwa negara pinggiran pun bisa berkembang, meski perkembangan tersebut adalah perkembangan yang bergantung. Dinamika dan impuls perkembangan tersebut, tidak berasal dari negara pinggiran tetapi datang dari negara pusat. Ketertinggalan dan juga ketergantungan yang terjadi pada negara-negara pinggiran disebabkan oleh ekonomi negara-negara pinggiran yang tidak dapat menyeimbangkan dengan ekonomi negara maju atau

negara pusat. Maka jika ekonomi negara pusat mengalami kemajuan dan berkembang, maka ekonomi negara pinggiran pun ikut mengalami kemajuan. Tetapi sebaliknya, jika negara pusat mengalami kesulitan terutama dalam hal ekonomi, maka sudah pasti negara-negara pinggiran pun akan mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh negara-negara pinggiran sangat bergantung sekali dalam ekonomi kepada negara pusat. Namun jika negara-negara pinggiran yang mengalami kesulitan ekonomi, keadaan ekonomi negara maju tidak akan terpengaruh karena negara pusat tidak tergantung secara ekonomi kepada negara-negara pinggiran (Santos, 1970).

Menurut Dos Santos, negara pinggiran atau negara bagian satelit pada dasarnya hanyalah bayangan dari negara pusat. Definisi ini sebenarnya berbeda dengan konsep ketergantungan André Grunder Frank. Bagi Frank (1969) hubungan dengan negara pusat tidak selalu berdampak negatif pada negara satelit atau negara pinggiran. Tidak akan ada pembangunan di negara satelit, selama negara tersebut masih tetap bergantung dan mengindik kepada negara pusat. Kontribusi lain

dari Dos Santos adalah penjelasan lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan. Santos membedakan tiga bentuk ketergantungan, yaitu: pertama, ketergantungan Kolonial: Di sinilah muncul dominasi politik dalam bentuk penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan dan ekspor produk pertanian yang diperlukan dari negara-negara kolonial. Koloni memonopoli tanah, tambang, dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk lokal adalah eksploitatif.

Kedua, ketergantungan finansial-industrial: Negara-negara perifer ini masih dikendalikan oleh kekuatan keuangan dan industri negara pusat, sehingga pada dasarnya ekonomi negara pinggiran adalah satelit dari negara-negara pusat. Negara pusat berinvestasi, baik secara langsung atau dalam kemitraan dengan pengusaha lokal, untuk memproduksi bahan baku ini. Dengan demikian, kontrol dilakukan melalui kekuatan ekonomi dalam bentuk kekuatan finansial industri.

Ketiga, ketergantungan teknologis-industrial: Perusahaan multinasional di negara-negara pusat

mulai berinvestasi dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan untuk pasar domestik negara-negara perifer. Meskipun industri ini terletak di negara pinggir, yang sering dimiliki oleh pengusaha lokal teknologinya ada di tangan perusahaan multinasional. Biasanya barang modal berupa mesin industri tidak dijual sebagai komoditas tetapi disewakan melalui perjanjian paten.

Sehingga menurut Dos Santos, dugaan keterbelakangan itu ada karena ekonomi negara-negara pinggir tidak terintegrasi dengan kapitalisme. Di sisi lain, hambatan terbesar bagi pembangunan negara-negara ini adalah integrasi negara-negara tersebut ke dalam sistem internasional dan kepatuhan terhadap hukum pembangunan. Kapitalisme bukanlah kunci untuk memecahkan masalah, tetapi adalah penyebab masalah (Santos, 1970).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, menurut Moleong, (2009), desain penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data

dalam bentuk tertulis. Dengan demikian penelitian ini akan menginterpretasi data dengan tujuan untuk memberi gambaran yang akurat mengenai fakta-fakta dan hubungannya dengan sifat fenomena yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder. Sumber data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, dan juga situs berita online yang dianalisis sehingga dapat dirangkai menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Kesenjangan di Laos Sebagai Penghambat Pembangunan

Setelah pengenalan ekonomi pasar pada tahun 1986, kontradiksi antara kapitalisme dan sosialisme muncul dan mempengaruhi perdebatan tentang pembangunan di Laos. Banyak sarjana dalam studi Laos telah berurusan dengan kontradiksi bentuk kapitalisme di Laos, dan dampaknya terhadap penduduk lokal. Intinya kapitalisme dimaknai sebagai alat untuk mendorong pembangunan, sedangkan aspek negatifnya bisa dikendalikan oleh partai komunis yang bertujuan membangun masyarakat

sosialis dalam jangka panjang (Punya & Rehbein, 2020, pp. 89–111)

Masalah kesenjangan di Laos adalah masalah yang cukup serius juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan pembangunan di Laos. Laos adalah contoh tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang dalam menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan dengan pengurangan kemiskinan dalam menghadapi peningkatan ketimpangan yang tampaknya tak terelakkan. Dalam dua dekade setelah periode panjang terjadi ketidakstabilan di Asia Tenggara, ketidaksetaraan dalam pengeluaran rumah tangga di Laos telah melebar secara dramatis (Menon, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat di Laos disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang sangat minim. Kalangan berpendidikan yang telah diberi beasiswa oleh pemerintah Laos untuk bersekolah di luar negeri, lebih banyak yang memilih tinggal dan pindah ke luar negeri, untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2005, sebanyak 37% penduduk Laos yang telah disekolahkan oleh pemerintah Laos,

memilih tinggal di luar negeri (Prihtiyani, 2011). Ini disebabkan perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tidak akan berhasil jika masih memiliki sumber daya manusia yang belum mumpuni. Hal ini akan semakin sulit bagi Laos untuk bisa mewujudkan program *reduce inequality* di negaranya.

Reduce inequality adalah salah satu program dari SDGs pada tujuan ke-10. Dalam *United Nations Office for Outer Space Affairs* (UNOOSA) program *reduce inequality* bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara. SDGs ini menyerukan pengurangan ketidaksetaraan dalam pendapatan serta ketidaksetaraan berdasarkan usia, jenis kelamin, kecacatan, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya dalam suatu negara. Tujuannya juga mengatasi ketidaksetaraan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi dan bantuan pembangunan. Komunitas internasional telah membuat langkah signifikan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan. Negara yang paling rentan adalah negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang

terkurung daratan dan negara-negara berkembang pulau-pulau kecil terus membuat kemajuan besar dalam pengurangan kemiskinan. Namun, ketimpangan masih tetap ada dan kesenjangan besar tetap ada dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan serta aset lainnya (unoosa, 2021).

Pada saat terbentuknya SDGs, hampir 80 persen penduduk Laos hidup dengan kurang dari \$2,5 per-hari (World Bank, 2015). Mitra pembangunan telah memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada pemerintah Laos untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, peningkatan manajemen keuangan, pengembangan sektor swasta, diversifikasi kegiatan ekonomi untuk lapangan kerja, peningkatan proses pertanian dan peningkatan pendapatan, dan termasuk kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi (Punya & Rehbein, 2020).

Berkaitan dengan *reduce inequality* khususnya dalam masalah ekonomi dan pembangunan, untuk

mengatur suatu negara termasuk kedalam kategori miskin, berkembang atau kaya diperlukan lima indikator yang dapat mengidentifikasi kondisi negara tersebut. Pertama, Kekayaan rata-rata yang sifatnya rata-rata atau diakumulasikan, tanpa melihat adanya *gap* penduduk miskin dan penduduk kaya. Maka kekayaan rata-rata ini memiliki kelemahan, yaitu harus melihat aspek yang lainnya juga secara lebih luas.

Kedua, Pemerataan sebagai upaya untuk menawarkan kesempatan yang luas kepada warga negara untuk memperoleh pendapatan, sandang, pangan, dan perumahan yang seadil mungkin. Negara-negara miskin memiliki dilema antara fokus pada pertumbuhan dan keadilan ekonomi.

Ketiga, kualitas hidup. Cara lain untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk suatu negara adalah dengan membandingkan material Physical Quality of Life Index (PQLI). PQLI mengukur tiga indikator, yakni: harapan hidup setelah satu tahun, jumlah rata-rata kematian bayi baru lahir, dan terakhir, rata-rata tingkat melek huruf dan buta huruf.

Keempat, Kerusakan lingkungan dari aspek ini dapat melihat bagaimana kondisi lingkungannya, apakah lingkungan rusak atau lingkungan terjaga. Jika lingkungan sudah rusak maka akan berimbas pada kehidupan manusia menjadi terganggu, sehingga sulit untuk bisa membantu dalam memaksimalkan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya yang kelima, Keadilan sosial dan kesinambungan, jika masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi di suatu negara maka hal ini dapat menimbulkan perpecahan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Bahkan yang terparah akibat dari kesenjangan sosial ini bisa menimbulkan konflik militer, yang dapat mengakibatkan gejolak politik. Akibat dari gejolak politik tersebut, dapat merusak dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sudah terlaksana (Budiman, 2000).

Dalam mengatasi masalah kesenjangan terutama dalam hal pembangunan dan ekonomi di Laos yang berkaitan dengan SDGs, tidak lepas dari peran Partai Revolusi Rakyat Laos (LPRP). LPRP dianggap telah berhasil menafsirkan ulang mengenai

pelaksanaan program SDGs sehingga mendukung agenda pembangunan nasional tanpa menyerukan reformasi politik besar-besaran. SDGs di Laos didasarkan pada empat pilar yang ditetapkan oleh LPRP yaitu: pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan tata kelola atau keamanan yang baik (Punya & Rehbein, 2020). Empat pilar tersebut memiliki keterkaitan dengan lima indikator sebelumnya. Pemerintah Laos mencoba perlahan-lahan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan yang dimulai dari mengatasi kesenjangan ekonomi. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Laos dalam mengatasi kesenjangan, yaitu perlu meningkatkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Sebab masalah kesenjangan dan pembangunan di Laos akan tetap sulit mendapatkan hasil maksimal jika masih memiliki permasalahan sumber daya manusia yang menjadi hambatan bagi Laos untuk bisa berkembang.

Pertumbuhan Ekonomi dan Populasi Laos

Laos merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan hasil pertanian. Ekonomi Laos adalah

ekonomi berpenghasilan rendah-menengah yang tumbuh cepat. Sebagai salah satu dari lima negara sosialis yang tersisa selain Tiongkok, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam. Model ekonomi Laos mirip dengan pasar sosialis di Tiongkok atau investasi dan kepemilikan pribadi di pasar yang dominan. Laos saat ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan pertumbuhan PDB rata-rata 8% per-tahun. Meskipun pertumbuhan pesat, Laos tetap menjadi salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Laos merupakan sebuah negara yang terkurung daratan, memiliki infrastruktur yang tidak memadai dan sebagian besar tenaga kerja tidak terampil. Namun, Laos terus menarik investasi asing berkat integrasinya ke dalam komunitas ekonomi ASEAN, tenaga kerja mudanya yang besar, dan perlakuan pajak yang menguntungkan (Philip, 2012).

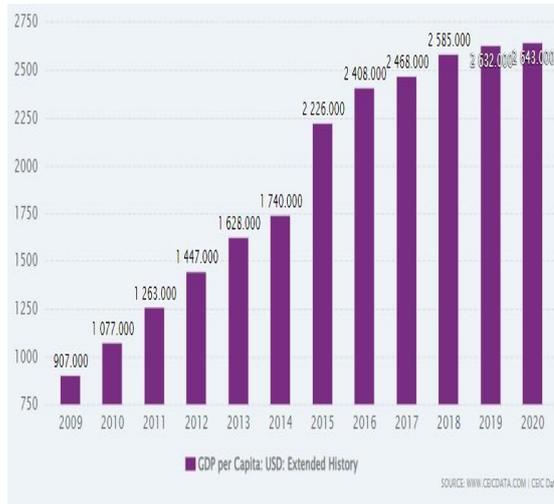
Untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, juga dilihat dari produk domestik bruto (PDB) dan juga dari jumlah penduduk. PDB Laos dari tahun 1984 hingga 2000 mengalami pasang

surut. Efek dari krisis keuangan Asia 1997, bersama dengan salah urus ekonomi pemerintah Laos sendiri, menyebabkan inflasi yang cepat dan devaluasi tajam, yang kehilangan 87% nilainya antara Juni 1997 dan Juni 1999.

Kebijakan moneter yang lebih ketat menghasilkan dalam stabilitas makroekonomi yang lebih tinggi pada tahun fiskal 2000, dan inflasi bulanan, yang rata-rata sekitar 10%. Pada paruh pertama tahun fiskal 1999 turun menjadi rata-rata 1% selama periode yang sama tahun fiskal 2000, lebih dari 20% dari waktu PDB dan mewakili lebih dari 75% dari investasi publik. Perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian yang tidak produktif, yang sebagian besar beroperasi di luar ekonomi uang dan ketika-ektor publik terus memainkan peran dominan. Namun, beberapa perusahaan swasta telah membuat industri seperti kerajinan tangan, bir, kopi dan pariwisata. Dengan dukungan PBB Jepang dan Jerman, bekas Kamar Dagang yang dikendalikan negara ingin mempromosikan sektor swasta, Kamar Dagang dan Industri Nasional Laos dan subdivisi provinsinya.

Gambar di bawah ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Laos dari tahun 2009 hingga 2020 (ceicdata.com, 2021).

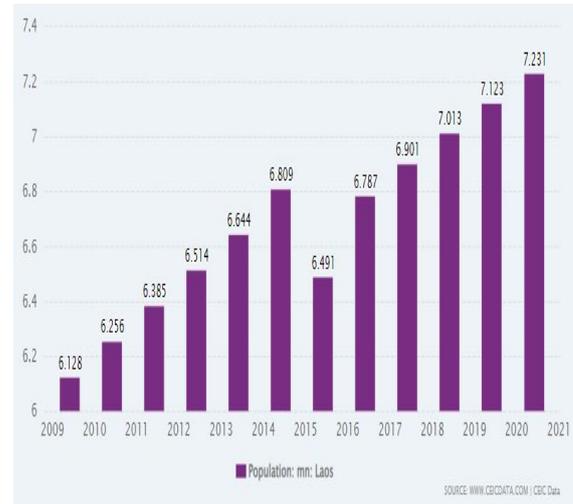
Grafik 1. PDF Laos



Sumber: (ceicdata.com, 2021)

Berdasarkan data dari grafik diatas pertumbuhan ekonomi Laos terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Pada tahun 2009 PDB laos hanya sebesar USD 907.000, dan terus meningkat setiap tahunnya sampai mencapai puncaknya ditahun 2020, yaitu PDB Laos sebesar USD 2.643.000. Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi di Laos pun ikut meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 (ceicdata.com, 2021).

Grafik 2. Populasi Laos



Sumber: (ceicdata.com, 2021)

Tahun 2009 populasi Laos masih sangat sedikit yaitu hanya 6.128 ribu dan populasi Laos meningkat cukup signifikan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 7.231 ribu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan populasi Laos dapat dijadikan tolok ukur kemajuan negara tersebut (ceicdata.com, 2021). Tetapi meskipun pertumbuhan ekonomi dan populasi di Laos mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tidak menjadikan Laos ke luar sebagai negara miskin. Meskipun jumlah populasi di Laos meningkat setiap tahunnya, tetapi sumber daya manusianya tidak ikut meningkat. Sehingga yang terjadi

adalah Laos tetap saja menjadi negara miskin yang masih sangat tergantung kepada Tiongkok, sebab Laos belum bisa melakukan pembangunan yang baik di negaranya sendiri. Laos masih membutuhkan negara lain untuk bisa membangun negaranya (data bank, 2020).

Ketergantungan Laos Terhadap Tiongkok Dalam Ekonomi dan Pembangunan

Sebelum membahas hubungan Laos- Tiongkok, penting untuk melihat lebih luas kebijakan luar negeri Tiongkok di Asia Tenggara. Dengan demikian, hubungan Laos dengan Tiongkok sebagai anggota ASEAN akan lebih mudah dipahami. Asia Tenggara selalu menjadi zona khusus dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Hal ini dikarenakan letak geografis, latar belakang sejarah dan migrasi masyarakat Tionghoa ke wilayah tersebut. Tiongkok menggunakan berbagai alat diplomatik, ekonomi, dan militer untuk memajukan kepentingan strategisnya di Asia Tenggara. Alat-alat ini telah berevolusi dan berubah seiring dengan kemajuan Tiongkok. Cara Tiongkok terlibat di Asia

Tenggara merupakan informasi latar belakang yang sangat penting untuk memahami hubungan Laos-Tiongkok.

Ketergantungan Laos dalam bidang ekonomi dan pembangunan menyebabkan utang luar negeri Laos semakin meningkat kepada Tiongkok. Dana pinjaman tersebut digunakan Laos untuk tujuan pembangunan di negaranya. Faktor lainnya yang membuat ekonomi Laos saat ini terpuruk yaitu, disebabkan oleh kondisi perekonomian Tiongkok yang sempat menurun, sehingga menyebabkan Laos terkena imbasnya. Harus diingat bahwa perkembangan ekonomi Laos yang dimulai pada tahun 1986 mengarah pada pembentukan distribusi rasional dan redistribusi semua pendapatan, harga pasar, dan lain-lain. Para pemimpin Laos melihat bahwa kebangkitan Tiongkok akan bermanfaat bagi perkembangannya sendiri dan memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Tiongkok. Laos terkesan dengan perkembangan ekonomi Tiongkok yang pesat dan pertumbuhan yang stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi Laos sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur. Dengan

demikian, Laos menyadari bahwa dengan bekerja sama dengan Tiongkok, dapat mengatasi kelemahan geografisnya melalui proyek konektivitas infrastruktur seperti BRI untuk mengubah negara dari “negara yang terkurung daratan” menjadi negara yang terhubung ke “bumi”. Secara kebetulan, proyek BRI yang dicanangkan Tiongkok mirip dengan strategi pembangunan Laos (Bachtiar, 2020)

Perbaikan dan pembangunan di bidang-bidang seperti pertanian, listrik dan industri merupakan hal mendasar bagi pembangunan sosial-ekonomi Laos. Bantuan Tiongkok ke Laos di bidang-bidang ini sangat penting dan terus berkembang. Dalam kerjasama pertanian, Tiongkok telah memperkenalkan tingkat teknologi dan produksi yang lebih tinggi selain teknologi pengendalian hama dan sebagainya, yang telah membawa keuntungan besar bagi Laos. Selanjutnya di bidang kerja sama teknis, selain kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berupa kerja sama Lancang-Mekong Tiongkok (LMT) juga memberikan modal kepada Laos di bidang televisi dan satelit komunikasi (Bachtiar, 2020).

Di awal September 2021, pemerintah Laos menandatangani kesepakatan untuk memberikan mayoritas kontrol jaringan listriknya ke perusahaan milik negara Tiongkok di tengah meningkatnya utang publik karena Tiongkok terus memperluas perannya di negara tersebut. Tiongkok Southern Power Grid Company milik negara menandatangani kesepakatan dengan Electricite du Lao milik pemerintah Laos untuk mendapatkan kendali mayoritas atas perusahaan baru, Electricite du Lao Transmission Company Limited, yang akan mengatur pasokan listrik nasional. Tiongkok adalah sumber pembiayaan terbesar Laos dan negara Asia Tenggara memainkan peran utama dalam proyek global BRI. Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadikan infrastruktur global dan rencana pembangunan sebagai landasan kebijakan luar negeri Tiongkok.

Membiarkan Tiongkok menjadi investor asing terbesar bagi Laos dan memberi bantuan datang dengan harga yang mahal. Sumber utama pembiayaan proyek Tiongkok didominasi oleh perpanjangan jalur kredit jangka panjang. Namun di Laos,

utang publik telah tumbuh hingga lebih dari 65% dari PDB. Dengan bertambahnya utang, tentu saja hal ini membuat Laos semakin bergantung pada Tiongkok. Laos telah mengumpulkan utang luar negeri yang signifikan selama dekade terakhir terkait dengan proyek pembangkit listrik tenaga air baru, serta proyek infrastruktur BRI. Selain itu, lembaga penelitian Jerman di Kiel melihat beberapa data dan menyimpulkan bahwa Tiongkok telah menjadi pemberi pinjaman terbesar di dunia, melampaui kelompok-kelompok seperti Dana Moneter Internasional dan World Bank. Antara tahun 2000 dan 2017, banyak negara berhutang banyak ke Tiongkok, dari kurang dari \$500 miliar menjadi lebih dari \$5 triliun, peningkatan sepuluh kali lipat (Xinhua, 2019).

Sementara perkembangan yang menjanjikan peningkatan pendapatan penting kualitas hidup, sebagian besar pendapatan masyarakat di Laos sudah lebih tinggi daripada di negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Di luar ibu kota, hingga 80% populasi terlibat dalam pertanian sebagai mata pencaharian yang mendukung

masyarakat lokal tetapi tidak tercermin dalam statistik pendapatan atau pertumbuhan PDB. Jika ingin mencapai pembangunan berkelanjutan, Laos harus mempertahankan kontrol atas sumber daya alamnya (asean today, 2020).

Pengaruh Tiongkok di Laos terlihat jelas ketika mengkaji tentang Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) di Laos sebagai akibat dari strategi “going-out” pemerintah Tiongkok. FDI Tiongkok telah menjadi pendorong utama ekonomi Laos, melalui 830 proyek pembangunan dengan biaya lebih dari \$5 miliar pada tahun 1989 dan 2014 (Ministry of Planning and Investment Lao PDR, 2018). Selain itu, Tiongkok telah berinvestasi di bidang pertanian, ekstraksi sumber daya, dan proyek infrastruktur, seperti jalur kereta api berkecepatan tinggi antara Yunnan dan Thailand.

Sebagai negara yang terkurung daratan, negara-negara tetangga adalah mitra penting FDI ke Laos, berinvestasi di berbagai sektor termasuk pembangkit listrik tenaga air, agribisnis, pertambangan dan pembangunan infrastruktur dan

lingkungan baru dibangun. Sejauh ini, Tiongkok merupakan pemasok FDI terbesar ke Laos. Selama 20 tahun terakhir, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari 10 miliar USD di Laos. Selama periode 20 tahun yang sama, pemasok FDI terbesar kedua dan ketiga ke Laos, Thailand, dan Vietnam masing-masing menginvestasikan \$4,7 miliar dan \$3,9 miliar, sementara Korea Selatan dan Jepang masing-masing hanya menyediakan \$751 juta dan \$180 juta. Khususnya, FDI Jepang ke Laos tidak sama besarnya atau pentingnya dengan bantuan negara, meskipun pada tahun 2019 mencapai \$22 juta, menjadikannya investor terbesar ketiga di Laos tahun 2021. Pada tahun yang sama, total FDI Tiongkok mencapai sekitar 1 miliar USD (Sims, 2021).

Selain FDI, proyek BRI Tiongkok juga sangat menguntungkan bagi Laos untuk kemajuan negaranya, meskipun dari program-program bantuan Tiongkok tersebut menyebabkan utang luar negeri yang cukup tinggi bagi Laos. Sementara pembuat kebijakan Laos mengharapkan kereta cepat yang diberi nama Laos-China Railway (LCR) untuk mengurangi biaya transportasi,

meningkatkan FDI dan mendorong pertumbuhan ekonomi. LCR juga dapat menjadikan Laos dapat terhubung dengan negara-negara tetangganya. Kini Laos bukan lagi negara yang terkurung daratan, melainkan negara yang terhubung dengan banyak negara, atau istilah lainnya terhubung dengan 'bumi'. Kehadiran LCR sangat menguntungkan bagi Laos, karena dengan adanya proyek kereta cepat seperti LCR dapat memudahkan para masyarakat Laos dengan waktu tempuh yang lebih cepat dari kereta biasa (Bosoni, 2021).

International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan keprihatinan bahwa dukungan Tiongkok terhadap pembiayaan pembangunan LCR terutama dalam bentuk pinjaman, menyoroti resiko utang nyata untuk Laos. Utang Laos ke Tiongkok diperkirakan mencapai 45% dari PDB pada 2019.

Gambar 1. Laos China Railway



Sumber: (China daily, 2021)

Awal tahun 2021, karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban utangnya, pemerintah Laos menandatangani perjanjian konsensi 25 tahun yang memungkinkan sebagian besar konstruksi perusahaan milik negara atau BUMN Tiongkok akan mengelola sebagian besar jaringan listrik negara (Bosoni, 2021).

Dengan demikian, ketergantungan Laos pada Tiongkok yang masih tinggi menyebabkan Laos semakin sulit untuk bisa melaksanakan program *reduce inequality* SDGs. Mengingat utang luar negeri Laos pada Tiongkok juga cukup besar dan tidak seimbang dengan GDP Laos. Maka dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk Laos bisa sepenuhnya melaksanakan program *reduce inequality* di negaranya. Selama Laos masih belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka selama itu pula Laos akan terus bergantung pada Tiongkok dan kesenjangan di Laos pun masih akan terus berlanjut. Sebab sumber daya manusia adalah kunci utama dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara.

Simpulan

Ketergantungan Laos pada Tiongkok dalam ekonomi dan pembangunan, membuat utang luar negeri Laos terus meningkat. Ketergantungan yang terus menerus akan membuat Laos semakin sulit untuk bisa mewujudkan program berkelanjutan di negaranya. Hal ini tentu saja akan semakin menghambat bagi tercapainya tujuan SDGs mengenai *reduce inequality* dalam bidang pembangunan. Hubungan saling ketergantungan ini lebih banyak menguntungkan Tiongkok dibandingkan Laos. Sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan efek domino jika ekonomi Tiongkok mengalami *colaps*, maka Laos pun akan terkena efeknya.

Dari penelitian ini juga menemukan fakta, bahwa utang luar negeri Laos semakin besar tetapi masalah kesenjangan di Laos pun masih belum bisa teratasi dengan baik. Serta masalah pembangunan di Laos pun masih belum efektif, sehingga hal inilah yang perlu di evaluasi oleh pemerintah Laos, dan mencoba untuk perlahan melepaskan diri dari belenggu Tiongkok. Meskipun sulit, tetapi jika

Laos mampu mengoptimalkan potensi yang ada di negaranya, ketergantungan terhadap Tiongkok bisa berkurang perlahan. Dengan demikian, setidaknya program *reduce inequality* dapat terwujud dan pembangunan berkelanjutan di Laos dapat berjalan sedikit demi sedikit, tanpa sepenuhnya bergantung kepada Tiongkok.

REFERENSI

- Asean today. (2020). *Kesepakatan kekuatan baru China membuat Laos mempertaruhkan masa depannya untuk keuntungan cepat*. Asean Today. <https://www.aseantoday.com/2020/09/new-chinese-power-deal-sees-laos-risk-its-future-for-quick-gains/?lang=id>
- Asean today. (2021). *Pergeseran kepemimpinan Laos akan melihat perkembangan yang genting, kebijakan luar negeri terus berlanjut | ASEAN Hari ini*. Asean Today. <https://www.aseantoday.com/2021/01/lao-leadership-shuffle-will-see-precarious-development-foreign-policy-continue/?lang=id>
- Bachtiar, S. & J. W. (2020). Lao People's Democratic Republic's Dependency on China's Infrastructure Assistance. *International Journal of East Asian Studies*, 9(1), 19–31. <https://doi.org/10.22452/ijneas.vol9no1.2>
- BBC. (2010). *Tergantung pada produk luar - BBC News Indonesia*. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/aporan_khusus/2010/01/100107_1aos4
- Bosoni, N. (2021). *Laos Unlocked*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/12/laos-unlocked/>
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Cetakan Ke). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ceicdata.com. (2021). *Laos | Populasi | 1950 – 2021 | Indikator Ekonomi | CEIC*. Ceicdata.Com. <https://www.ceicdata.com/id/indicator/laos/population>
- China daily. (2021). *China-Laos Rail Enhances Connectivity For Economic And Social Benefits of Both Peoples*. Chinadaily.Com. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/02/WS61a8e75ea310cdd39bc7902b.html>
- Data bank. (2020). *GDP (current US\$) - Lao PDR | Data*. Data Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=LA&most_recent_value_desc=true
- Frank, A. G. (1969). Capitalism and Underdevelopment in Latin America. In *Modern Reader Paperbacks*. Modern Reader Paperbacks.
- Kazuhiro, F. (2010). The Increasing

- Presence of China in Laos Today : A Report on Fixed Point Observation of Local Newspapers from March 2007 to February 2009. *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies*, 27(February), 65–83.
- Menon, J. (2018). *Raising Inequality In Laos*. The Asia Dialogue. <https://theasiadialogue.com/2018/09/12/rising-inequality-in-laos/>
- Ministry of Planning and Investment Lao PDR. (2018). Progress report of sector working group. *Department of International Cooperation*.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Philip, B. (2012). Laos, south-east Asia's new emerging economy. *The Guardian*.
- Prihtiyani, E. (2011). *Laos Mengatasi Ketertinggalan Ekonomi*. Kompas. <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/03/28/05182886/Laos.Mengatasi.Ketertinggalan.Ekonomi?page=all>
- Punya, S., & Rehbein, B. (2020). Sustainable Development Goals under Party-led Development in Laos. *Journal of Mekong Societies*, 16(1), 89–111.
- Putri, V. K. M. (2021). *Laos, Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Tidak Memiliki Perairan*. Halaman all - Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/05/155155869/laos-satu-satunya-negara-asia-tenggara-yang-tidak-memiliki-perairan?page=all>
- Santos, T. Dos. (1970). The Structure of Dependence. *American Economic Association*, 60(2), 231–236. <https://www.jstor.org/stable/1815811>
- SIIS. (2016). Assessment and Prospect of China-Laos Development Cooperation. *Shanghai Institutes For International Studies*, September, 47. http://www.siiis.org.cn/UploadFiles/file/20170417/20170316_中国与老挝发展合作_英文版.pdf
- Sims, K. (2021). *On China's Doorstep, Laos Plays a Careful Game of Balancing*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/07/on-chinas-doorstep-laos-plays-a-careful-game-of-balancing/>
- UN Departement of Economic and Social Affairs. (2021). *SDGs Indicators*. Unstats.Un.Org. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=10&Target>
- Unoosa. (2021). *Sustainable Development Goal 10: Reduced Inequalities*. United Nations Office for Outer Space Affairs. <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/sdg10.html>

World Bank. (2015). *Driver of poverty reduction in Lao PDR*. World Bank.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/590861467722637341/pdf/101567-REPLACEMENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-Policy-Notes-Drivers-of-Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf>.

Xinhua. (2019). *2 tunnels Dug through in China-Laos Railway Construction*. Xinhua.Net.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/15/c_137979085.htm